



Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar

1st Ni Putu Dewi Amelia Permata Sari^a, 2nd Putu Eka Purnamaningsih^a, 3rd Komang Adi Sastra Wijaya^a

^aFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: dewiamelia129@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pemecutan Kaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, efektivitas PKH yang diukur menggunakan teori efektivitas Campbell J.P yaitu: Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Program, Tingkat Input dan Output, dan Pencapaian Tujuan Menyeluruh. Berdasarkan teori tersebut dapat dilihat bahwa program ini telah berjalan dengan baik namun belum maksimal dimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah tergambarkan secara baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sehingga dapat mengarah pada kesejahteraan masyarakat, namun masih terdapat permasalahan pada beberapa indikator seperti masih terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan keluarga penerima manfaat dari adanya program ini. Kurangnya kesadaran KPM, dimana mereka enggan melaporkan diri (Graduasi) padahal mereka sudah tidak memiliki komponen PKH.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

The Effectiveness of the Family Hope Program in Improving Community Welfare in Pemecutan Kaja Village, North Denpasar District, Denpasar City

The purpose of this study was to see the Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in Improving Community Welfare in Pemecutan Kaja Village. This study used descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Based on the results of research in the field, the effectiveness of PKH measured using Campbell J. P's effectiveness theory are Program Success, Target Success, Program Satisfaction, Input and Output Levels, and Overall Goal Achievement. Based on this theory, it can be seen that this program has been running well but not optimally where the implementation of the Family Hope Program has been well described and in accordance with the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program so that it can lead to community welfare, but there are still problems in several indicators such as there are still complaints submitted by beneficiary families from the existence of this program. Lack of awareness of KPM, where they are reluctant to report themselves (Graduasi) even though they no longer have a PKH component.

Keywords: Effectiveness, family hope program, community welfare

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah krusial yang menjadi tantangan oleh beberapa negara di dunia hingga saat ini. Kemiskinan adalah keadaan dimana suatu negara tidak mampu dalam mencapai tingkat kehidupan yang minimum. Kemiskinan menjadi salah satu target pemerintah dan pembangunan pada setiap negara, guna menekan angka pendapatan yang rendah di negara tersebut. Di Indonesia masalah kemiskinan selalu menjadi perhatian utama, hal ini karena pemerintah sadar bahwa dengan adanya kegagalan dalam mengatasi masalah kemiskinan maka akan menimbulkan permasalahan baru pada aspek sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Pada Maret 2020 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 26,42 juta atau sebesar 9,78%, kemudian naik sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 (Kementerian Sosial RI, 2021).

Saat ini Indonesia telah menunjukkan adanya peningkatan dalam aspek ekonomi dan sosial, dimana pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 26,16 juta jiwa pada Maret 2022 atau turun sebesar 0,34% (Kementerian Sosial RI, 2021). Meskipun terjadi penurunan, namun hal ini tidak menunjukkan realitas kemiskinan yang ada di Indonesia. Terdapat sekitar 13% penduduk yang masih hidup di atas garis kemiskinan dan 40% rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan (Dr. Rudy Gunawan, 2022). Menurut Adisasmita (2006) dalam Adawiyah (2020), disebutkan bahwa penyebab kemiskinan masyarakat yaitu: (1) kurang kesempatan memperoleh pendidikan, (2) memiliki modal yang terbatas, (3) tidak adanya kesempatan menikmati investasi, (4) tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar (pangan, papan, perumahan), (5) kurangnya produktivitas usaha, (6) tidak adanya tabungan, (7) kesehatan yang kurang terjamin, (8) tidak memiliki asuransi dan jaminan sosial, (9) terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan, dan (10) tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan ini perlu ditanggulangi mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

Berdasarkan beberapa program yang sudah digulirkan oleh pemerintah Indonesia, adapun salah satu program perlindungan sosial yaitu Program Bantuan Tunai Bersyarat dimana sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2007, dimana ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. Kebijakan tersebut, selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan ini berupa pemberian bantuan dana yang disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi dan dilanjutkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, 2018). Program ini bertujuan untuk membantu Keluarga Sangat Miskin (KSM) dalam meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengikuti syarat-syarat dalam mengakses layanan kesehatan serta pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM). Adanya pemberian akses ini diharapkan dapat memberi perubahan perilaku masyarakat guna mendukung tercapainya kesejahteraan sosial (Lestari & Talkah, 2020).

Tabel 1 Tabel Jumlah Penerima PKH di Indonesia pada Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	Anggaran (dalam triliun)
1	2018	10 juta jiwa	17,5
2	2019	10,3 juta jiwa	32,65
3	2020	10 juta jiwa	37,4
4	2021	10 juta jiwa	28,3

Sumber: *Persentase Jumlah Penerima PKH Di Indonesia* Diolah dari Dinas Sosial (2021)

Terlihat dari data di atas bahwa jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia tetap berada di angka 10 juta jiwa, akan tetapi tiap tahunnya memiliki anggaran yang berbeda dan cenderung meningkat. Besaran anggaran PKH tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan jumlah masyarakat penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya penurunan yang signifikan pada jumlah Rumah Tangga Miskin di Indonesia selama empat tahun terakhir.

Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia, seperti halnya pada provinsi lainnya juga tidak luput dari masalah kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2022), jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2022 dilaporkan berkurang jika dibandingkan pada periode September 2021. Hanif Yahya selaku Kepala BPS Provinsi Bali, dalam laporan resmi Statistik BPS (2022) menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin di Bali pada periode Maret 2022 adalah 205,68 ribu orang, dimana jumlah ini berkurang sekitar 5,78 ribu orang dibandingkan dengan September 2021. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat yang bisa dikatakan belum sejahtera. Melihat hal tersebut, pemerintah provinsi Bali tentunya terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan melaksanakan berbagai macam bentuk program-program pengentasan kemiskinan termasuk salah satunya yaitu dana bantuan PKH yang telah disebutkan tadi. Provinsi Bali sendiri telah melaksanakan PKH sejak tahun 2010, yang dimana awalnya hanya dilaksanakan di beberapa kabupaten di Provinsi Bali. Hingga saat ini, penyelenggaraan PKH sudah terlaksana di seluruh daerah di Provinsi Bali termasuk Kota Denpasar. Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Daerah Tangguh Sosial, dimana salah satu layanannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali dan tentunya sebagai sebuah ibu kota, Denpasar menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Bali. Sebagai Pusat kota, Denpasar tidak terlepas dari permasalahan penduduk miskin, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 1 Tabel Jumlah Penduduk Miskin di Kota Denpasar pada Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah (ribu)	Presentase
2018	20,72	2,24
2019	19,83	2,10
2020	20,48	2,14
2021	29,41	2,96

Sumber: Tingkat Kemiskinan di Kota Denpasar data diolah dari BPS (2021)

Berdasarkan data dari tabel di atas ditunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar dari tahun 2018 hingga 2021 tidak stabil dan cenderung meningkat. Dapat dilihat pada tahun 2019 presentase Kemiskinan di Kota Denpasar mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak cukup memuaskan mengingat presentasenya hanya turun sebanyak 0,89 ribu atau 0,14%. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin kembali meningkat sekitar 0,65 ribu atau 0,04%. Hanya dalam kurun waktu satu tahun, yakni dari tahun 2020 hingga 2021 jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar meningkat cukup pesat yakni sekitar 0,82% atau sebanyak 8,93 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagai pusat kota, Denpasar masih tetap memiliki masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Kota Denpasar merupakan kabupaten/kota ketujuh yang menerapkan Program Keluarga Harapan di Provinsi Bali, dimana pertama kali dimulai pada tahun 2015 setelah sebelumnya terdapat Kabupaten Karangasem, Buleleng, Tabanan, Bangli, Klungkung, dan Jembrana (Darmayanthi, Yasintha, & SUPRILIYANI, 2019). Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan Kota Denpasar sendiri, dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga saat ini memiliki 3.080 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dan dari bulan Januari sampai September 2022 telah disalurkan bantuan sebesar Rp. 5,2 M lebih. Berikut jumlah penerima PKH di Kota Denpasar Per-Kecamatan dari tahun 2018-2022,

Tabel 2 Tabel Penerima PKH di Kota Denpasar Per-Kecamatan dari Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Denpasar Barat	675	470	401	418	793
2	Denpasar Selatan	563	469	457	462	871
3	Denpasar Timur	813	340	369	310	644
4	Denpasar Utara	895	770	746	736	772
Jumlah		2.946	2.046	1.973	1.926	3.080

Sumber: data diolah dari Dinas Sosial (2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerima PKH di Kota Denpasar dari tahun 2018-2021 mengalami penurunan, namun kembali mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2022 yakni sebesar 1.154 KPM. Jika dilihat lagi total Keluarga Penerima Manfaat di Kota Denpasar sebesar 3.080 keluarga, sedangkan menurut data BPS Kota Denpasar tahun 2022 menyatakan bahwa jumlah penduduk kurang mampu di Kota Denpasar yakni sebesar 29.410 ribu jiwa. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk kurang mampu dengan Keluarga Penerima Manfaat tersebut. Kecamatan Denpasar Utara merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penerima manfaat terbanyak jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Denpasar, yakni sebesar 772 kepala keluarga pada tahun 2022. Berikut Rekap Data Keluarga Penerima Manfaat PKH Per-Desa/Kelurahan di Kecamatan Denpasar Utara,

Tabel 3 Tabel Data Keluarga Penerima Manfaat PKH Per-Desa/Kelurahan di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	KPM Tahap		
		I	II	III
1	Dangin Puri Kaja	71	61	75
2	Dangin Puri Kangin	30	21	25
3	Dangin Puri Kauh	36	45	52
4	Ubung	43	42	44
5	Ubung Kaja	37	30	35
6	Tonja	87	72	78
7	Peguyangan	87	75	96
8	Peguyangan Kaja	37	32	34
9	Peguyangan Kangin	63	58	58
10	Pemecutan Kaja	216	158	190

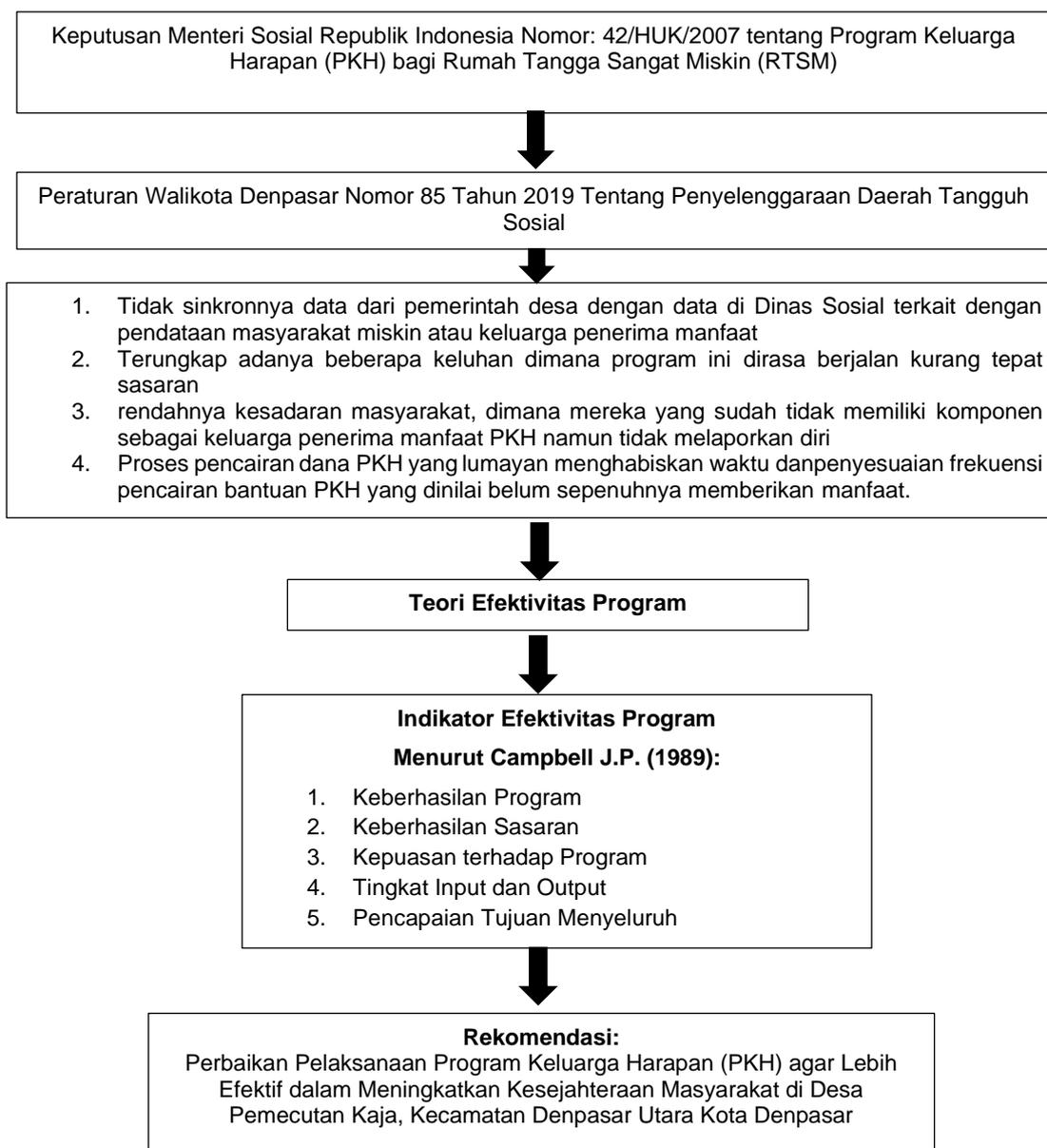
Sumber: Data diolah dari Dinas Sosial (2022)

Bedasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penerima manfaat terbanyak pada Tahap I sampai tahap III dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Denpasar Utara khususnya di Desa Pemecutan Kaja dengan total penerima pada tahap akhir yaitu 190 KPM. Jika dilihat kembali jumlah penerima PKH pada tahap I, II, dan III tidak konsisten, hal ini dikarenakan tidak sinkronnya data dari pemerintah desa dengan data yang ada di Dinas Sosial. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pemecutan Kaja, dimana terungkap adanya beberapa problematika terkait pelaksanaan program ini yakni, ketidaksinkronnya data dari pemerintah desa dengan data di Dinas Sosial terkait dengan pendataan masyarakat miskin atau keluarga penerima manfaat. Dimana hal ini menyebabkan jumlah penerima bantuan PKH tidak konsisten dan kerap kali berubah-ubah di setiap tahapnya.

Rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu permasalahan dalam pelaksanaan PKH dimana mereka yang sudah tidak memiliki komponen sebagai keluarga penerima manfaat PKH namun tidak melaporkan diri sehingga mereka tetap mendapatkan bantuan padahal masih terdapat masyarakat yang lebih layak mendapatkan bantuan tersebut. Serta proses pencairan dana PKH yang lumayan menghabiskan waktu dan penyesuaian frekuensi pencairan bantuan PKH yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan mengenai bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Masyarakat Miskin di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara

Kerangka Pemikiran



2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena data yang diperoleh akan diwujudkan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012) adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu sebuah prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Dimana hal ini bermaksud guna memahami fenomena terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Artinya penulis akan langsung terjun ke lapangan untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Penelitian ini dikatakan deskriptif dikarenakan lebih mengutamakan proses dibandingkan dengan hasilnya, dan penulis menggunakan pendekatan deskriptif karena bertujuan untuk mengupas lebih dalam fakta-fakta yang terjadi di lapangan baik secara lisan maupun tulisan.

Menurut Sugiyono (2014) sumber data diperlukan dalam melakukan pengumpulan data sehingga digunakan sumber primer dan sumber sekunder. adapun yang dimaksud sumber primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada penulis sedangkan sumber sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa benda/kebijakan yakni Program Keluarga Harapan di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara. Menurut Hamidi (2005) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda/suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu/kelompok sebagai subjek penelitian. Alasan dipilihnya benda/kebijakan sebagai unit analisis karena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan itu sendiri sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana efektivitas PKH tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Desa Pemecutan Kaja.

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis guna mendapatkan data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan yang berupa: hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang kemudian dirangkum, diolah dan dianalisa dengan pendekatan deskriptif yang nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami dan dipelajari oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam analisis data ini, penulis tetap bergerak dalam empat komponen yaitu dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung.

Pada teknik penyajian data, data yang didapatkan untuk pelaporan selanjutnya perlu adanya pengaturan dan disajikan dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih baik tentunya. Hasil yang diperoleh dari analisis data akan disajikan secara gabungan baik formal dengan informal. Kemudian penguraian data dilakukan dalam bentuk deskripsi kata-kata teks atau narasi dan dilengkapi dengan data formal yang dapat berupa gambar, tabel, dan dokumentasi jika dianggap perlu.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Temuan

Adapun hasil temuan penulis terkait dengan efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara berdasarkan pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell J.P, dimana teori ini menggunakan lima indikator sebagai berikut:

Keberhasilan Program

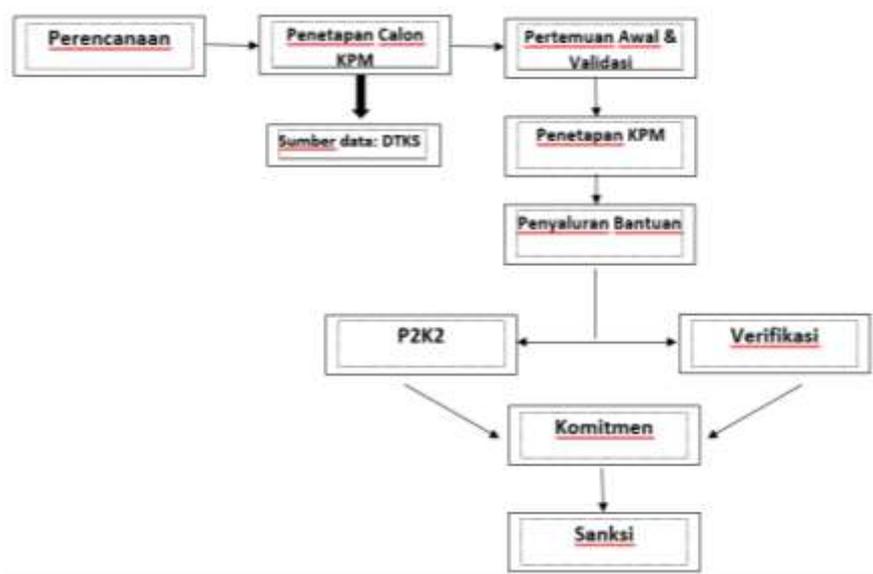
Keberhasilan program digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat sejauh mana program ini telah berjalan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana proses dan mekanisme dalam pelaksanaan program di lapangan sebagaimana yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 42/HUK/2007 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Daerah Tangguh Sosial. Sehingga penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat berjalan efektif dan optimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Peraturan tersebut menjadi pedoman khususnya bagi pelaksana program dalam bertindak di lapangan serta juga mengatur poin-poin penting seperti mekanisme, sasaran, tujuan dan strategi dalam pelaksanaan program.

Kecemburuan sosial antar masyarakat menyebabkan keluhan-keluhan muncul baik ke dinas maupun ke pihak desa. Keluhan-keluhan ini muncul dikarenakan mereka yang merasa memiliki latar belakang dan komponen yang sama namun tidak semua mendapatkan bantuan dari PKH. Hal ini dikarenakan data mengenai calon penerima bantuan hanya akan *diupdate* 5 tahun sekali, sehingga data penerima hanya akan bisa diperbaharui setelah berjalan 5 tahun, tidak bisa diganti ataupun ditambahkan. Para pelaksana khususnya Unit Pelaksana Kota Denpasar hanya bisa mengurangi jumlah penerima PKH saja.

Untuk mekanisme dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pemecutan Kaja secara mendalam tersusun dalam beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 seperti yang terlihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1 Mekanisme Pelaksanaan PKH



Sumber: data diolah dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018

Mekanisme dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pemecutan Kaja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Keluarga Penerima Manfaat juga mengikuti dengan baik semua alur dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pusat. Selain itu terkait dengan keluhan yang diterima oleh pihak desa maupun dinas terkait dengan kecemburuan sosial yang ada di masyarakat, dari pihak Dinas sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa mereka terbuka untuk meninjau ulang serta meminta agar masyarakat berkoordinasi dengan kepala desa terlebih dahulu agar nantinya dari pihak desa yang akan melakukan survey dan memvalidasi siapa saja yang akan dimasukkan ke DTKS.

Keberhasilan Sasaran

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pemecutan Kaja ini adalah pola pikir dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menganggap bantuan tersebut merupakan sumber penghasilan utama mereka, yang membuat mereka tidak mandiri dan merasa bahwa mereka akan ditanggung selamanya. Hal inilah yang membuat mereka terkadang enggan untuk bergerak dari zona nyaman mereka dan selalu bergantung pada bantuan PKH ini. Selain itu kurangnya kesadaran dari KPM sendiri untuk melaporkan diri bahwa

mereka sudah mandiri dan sudah tidak memerlukan bantuan PKH lagi sehingga bantuan tersebut bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Mereka cenderung diam dan membiarkan bantuan tersebut terus masuk padahal masih banyak yang memerlukan bantuan tersebut. Dalam hal ini mereka seharusnya melaporkan diri atau sering disebut dengan graduasi. Graduasi disini ada dua jenis yakni Graduasi Alami dan Graduasi Mandiri. Graduasi Mandiri dimana dari pihak KPM sendiri yang melapor bahwasanya mereka sudah mandiri baik dari segi ekonomi dan sosial seperti misalnya dikarenakan mereka memiliki UMKM, penghasilan mereka yang sudah layak, serta mereka sadar masih banyak yang lebih membutuhkan dari mereka. Graduasi Alami dimana mereka sudah keluar sebagai KPM dikarenakan mereka memang sudah tidak memiliki komponen PKH lagi (syarat PKH) seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, lansia dan disabilitas. Dengan begitu maka mereka secara otomatis tidak terdaftar lagi sebagai penerima manfaat PKH di SK Kementerian Sosial.

Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program berkaitan dengan pendapat dan tanggapan yang dirasakan dari penerima program maupun pelaksana program. Bagaimana penerima program merasakan manfaat dari adanya program tersebut. Semakin berkualitas program yang diberikan maka semakin tinggi kepuasan yang diterima. Dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pemecutan Kaja, dapat ditinjau apakah sasaran merasakan manfaat dari hadirnya program tersebut sehingga dapat menjadi solusi untuk permasalahan kesejahteraan masyarakat di Desa Pemecutan Kaja. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai obyeknya merasakan manfaat dari adanya program ini.

Masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat PKH ini merasa sangat puas dengan bantuan maupun pelayanan yang mereka dapat dari program Keluarga Harapan (PKH). Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya program ini terlebih lagi dalam hal pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun demikian masih terdapat masyarakat yang kurang puas dengan frekwensi system pencairan dana PKH yang dirasa belum cukup memberikan manfaat bagi mereka, mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi tiap anggota keluarga. Dengan demikian maka kepuasan terhadap Program Keluarga Harapan di Desa Pemecutan Kaja belum efektif dikarenakan adanya tingkat kepuasan yang masih kurang merata.

Tingkat Input dan Output

Tingkat input dan output suatu program dapat dijadikan pembanding dalam proses berjalannya suatu program, input sama dengan harapan pemerintah sedangkan output hasil dari program atau input dan output ini memiliki makna pembanding antara apa yang diharapkan oleh pemerintah apakah sudah sesuai dengan hasil Program Keluarga Harapan di Desa Pemecutan Kaja. Jika hasil dari program ini telah sesuai dengan harapan pemerintah maka program itu dapat dikatakan berhasil begitu pun sebaliknya jika hasil dari program ini belum sesuai dengan harapan pemerintah maka program yang dijalankan belum berhasil.

Harapan pemerintah (input) mengenai Program Keluarga Harapan Ini yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Untuk hasil yang dirasakan masyarakat (input) mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan pokok, wirausaha, serta pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan Program Keluarga Harapan ini secara output telah berjalan 80% dengan baik dan kategori input sebanyak 20% yang mana kita pergunakan sebagai perenungan dan perbaikan agar kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi. Maka berdasarkan hal ini tingkat *input* dan *output* mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah efektif.

Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Menurut Campbell pencapaian tujuan menyeluruh ditinjau dari sejauh mana sebuah program melakukan kewenangan dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan menggabungkan kriteria yang dapat menghasilkan efektivitas program. Guna memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan visi dan misi program dan juga apakah tujuan program sudah terlaksana, serta hubungan dalam setiap aspek Program Keluarga Harapan sudah terlaksana dengan baik.

Tabel 5 Jumlah Penerima PKH Desa Pemecutan Kaja pada Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Penerima PKH (KK)
2021	216
2022	190
2023	155

Sumber: data diolah dari Dinas Sosial Kota Denpasar tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Desa Pemecutan Kaja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berhasil mengalami penurunan. Dapat dilihat dari yang semula berdasar di angka 216 KK pada tahun 2021 kemudian menurun menjadi 190 KK pada tahun 2022 dan terakhir menjadi 155 KK di tahun 2023. Melihat hal ini maka dapat dikatakan bahwa PKH ini telah dapat mengurangi masyarakat kurang mampu di Desa Pemecutan Kaja, dimana dengan adanya penurunan penerima bantuan PKH ini.

Tujuan menyeluruh dari Program Keluarga Harapan di Desa Pemecutan Kaja ini telah tercapai karena bantuan ini telah mampu membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan pokok, wirausaha, serta pendidikan dan kesehatan mereka.

Analisis Hasil Temuan

Berdasarkan hasil temuan yang didapat penulis, adapun hasil Analisa dari Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang mengacu pada 4 indikator yang berpengaruh terhadap efektivitas program. Indikator-indikator tersebut berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell J.P yang terdiri dari Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Program, dan Tingkat Input dan Output.

Keberhasilan Program

Menurut Campbell indikator keberhasilan program merupakan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja dengan mengukur sejauh mana kesesuaian antara proses yang sudah tertuang dalam peraturan dengan yang terlaksana di lapangan. Hal ini terlihat dari proses dan mekanisme yang ada di lapangan. Konsep keberhasilan program dalam penelitian ini akan ditekankan pada Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

Dalam aspek prosesnya sendiri, Program Keluarga Harapan yang terlaksana di Kota Denpasar ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan yang berada dibawah Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Denpasar. Untuk pelaksanaan PKH di Kota Denpasar baru resmi terlaksana pada tahun 2015 dimana untuk proses perencanaan dan tahap awal berupa penentuan jumlah calon peserta PKH sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 oleh Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bapenda serta desa-desa terkait salah satunya Desa Pemecutan Kaja. Pemerataan penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap, dimana untuk Desa Pemecutan Kaja sendiri mulai merata penyalurannya di tahun 2018 hal ini dikarenakan Desa Pemecutan kaja merupakan daerah yang laporan keluarga pra-sejahteranya paling tinggi serta data calon penerima manfaatnya cenderung bertambah.

Program Keluarga Harapan (PKH) sejatinya merupakan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin maupun yang rentan mengalami kemiskinan, dengan mengikuti syarat-syarat dalam mengakses layanan kesehatan serta pendidikan yang telah ditetapkan bagi KPM. Adanya pemberian akses ini diharapkan dapat memberi perubahan perilaku masyarakat guna mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Maka dari itu, dalam proses pelaksanaan PKH, pemerintah daerah baik di tingkat kecamatan maupun Desa Pemecutan Kaja melakukan persiapan yang matang, terlebih lagi dalam hal fasilitasnya, baik sarana prasarana pendidikan maupun kesehatan yang memang harus dipersiapkan agar dapat maksimal membantu masyarakat dan digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pemecutan Kaja dari segi mekanismenya diawali dengan penetapan sasaran (*targeting*). Pada tahap Penetapan sasaran dikatakan bahwa pihak dinas dan desa hanya menjalankan apa yang sudah ditunjuk oleh pusat yaitu Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Sosial Keluarga yang melakukan penetapan sasaran program ini, implementor di daerah hanya merekomendasikan keluarga miskin yang

belum mendapatkan bantuan PKH ke Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Keluarga dan nanti Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Keluarga yang bisa menetapkan apakah usulan dari implemendor daerah bisa diterima atau tidak, tergantung kepada kuota yang ada.

Kemudian ada tahap pertemuan awal dan validasi, yang dimana dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis program. Pada tahapan pengedaran Surat Undangan Pertemuan Awal Program Keluarga Harapan dilakukan pula sosialisasi dan validasi yang dilaksanakan oleh pendamping PKH di daerah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan koordinator PKH Kota Denpasar, mereka sudah menjalankan tupoksi mereka dengan baik dan patuh pada poin-poin yang diamanatkan oleh kementerian untuk mengedarkan Surat Undangan Pertemuan Awal Program Keluarga Harapan kepada para calon penerima manfaat PKH ini, serta melakukan sosialisasi dengan mengundang seluruh penerima manfaat PKH dan memberikan penjelasan tentang Program Keluarga Harapan, bagaimana isi program, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban KPM, bagaimana dalam mempercepat proses pencairan dana dan persiapan pelaksanaan program dilapangan bersama penerima manfaat program. Tidak hanya itu, pendamping juga melakukan validasi pada saat pertemuan kelompok yang dilakukan pendamping nantinya. Pendamping sudah menjalankan ketentuan-ketentuan kebijakan dan melaksanakan tupoksi mereka dengan baik, sehingga berpengaruh baik terhadap keberhasilan program Keluarga Harapan di Desa Pemecutan Kaja.

Setelah tahap sosialisasi dan validasi, selanjutnya ada tahap penyaluran bantuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemensos dari yang awalnya penyaluran dana bantuan PKH secara tunai atau melalui kantor pos kemudian dirubah menjadi non-tunai atau melalui ATM Bank BNI yang diajak bekerjasama oleh Dinas Sosial Kota Denpasar, namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala yang di hadapi oleh si penerima manfaat PKH yaitu pada saat penarikan di ATM ibu-ibu KPM tersebut ada yang tidak bisa membaca serta pada awal perubahan dari tunai ke non-tunai dana bantuan PKH pencairannya tidak tepat waktu, sehingga proses pencairan dananya kembali dilakukan secara tunai yaitu melalui kantor pos dan desa adat. Berikut besaran Bantuan yang diberikan pada setiap komponen dalam Keluarga PKH, (kemensos.co.id):

1. Ibu hamil/nifas: Rp. 2.400.000,-
2. Anak usia dini: Rp. 2.400.000,-
3. SD: Rp. 900.000,-
4. SMP: Rp. 1.500.000,-
5. SMA: Rp. 2.000.000,-
6. Disabilitas Berat: Rp. 2.400.000,-
7. Lanjut usia: Rp. 2.400.000,-

(Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga)

Selanjutnya ada tahap pendampingan, tahap pendampingan dapat dikatakan berhasil apabila telah melaksanakan tahapan Pembentukan kelompok, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluargal Family Development Sesion (FDS), Verifikasi Pendidikan, Verifikasi Kesehatan, dan Pemuktahiran data. Pendampinglah yang melaksanakan tahapan ini dilapangan. Pembentukan kelompok telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, pembentukan kelompok yang dilaksanakan oleh pendamping di Desa Pemecutan Kaja sudah sangat baik sesuai dengan yang dikatakan oleh pendamping kelompok PKH Pemecutan Kaja. Mereka mengatakan bahwa dengan adanya pertemuan kelompok ini mempermudah mereka dalam berkomunikasi dengan KPM, selain itu juga mempererat rasa kekeluargaan pendamping dengan KPM. Family Development Sesion (FDS) sudah dilaksanakan oleh pendamping di Desa Pemecutan Kaja melalui proses pertemuan kelompok yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, dalam pertemuan kelompok pendamping Desa Pemecutan Kaja selalu memberikan pemahaman mengenai PKH, dana bantuan untuk apa saja, serta tak lupa menekankan pada hak dan kewajiban KPM itu sendiri.

Selanjutnya ada Verifikasi kesehatan dan verifikasi pendidikan juga telah dilaksanakan oleh pendamping PKH Desa Pemecutan Kaja setiap tiga bulan sekali ke puskesmas atau layanan kesehatan desa serta ke SD, SMP, dan SMA yang terdapat data KPMnya dengan membawa form verifikasi kesehatan dan form verifikasi pendidikan. Para pendamping juga selalu melakukan pemutakhiran data setiap kali ada perubahan terkait komponen PKH dari KPM itu sendiri, dimana pendamping terus melakukan *follow up* saat pertemuan kelompok di balai banjar ataupun kantor desa. Dapat dianalisis bahwa pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pendamping PKH di Desa Pemecutan Kaja sudah sangat baik karena sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan petunjuk teknis.

Komitmen PKH dilihat dari apakah penerima manfaat sudah melakukan komitmen mereka sebagai penerima

manfaat, maka bisa dikatakan bahwa penerima manfaat telah melaksanakan kewajiban baik dari komponen pendidikan, komponen kesehatan dan komponen kesejahteraan sosial. Tahapan yang terakhir yaitu adalah Sanksi PKH. Sanksi ini dilihat dari apakah penerima manfaat sudah mendapatkan sanksi sebagai penerima manfaat yang melanggar. Sejauh ini, dalam pelaksanaan PKH di Desa Pemecutan Kaja belum ada KPM yang menerima sanksi, hal ini dikarenakan hingga saat ini penerima manfaat di Desa Pemecutan Kaja tidak terdapat KPM yang terindikasi melakukan pelanggaran. Selain itu karena dari pihak daerah tidak berhak melakukan pengurangan bantuan dan pemecatan penerima manfaat, sanksi ini hanya dilakukan oleh pusat dan pendamping hanya memberikan laporan saja.

Dalam proses pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan mendapatkan tantangan pada pelaksanaannya berupa keluhan yang diungkapkan oleh masyarakat baik ke dinas maupun ke pihak desa. Dimana program ini dirasa berjalan kurang tepat sasaran. Adanya warga yang seharusnya tidak layak, namun tetap mendapat bantuan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar warga. Mereka yang merasa memiliki latar belakang dan komponen yang sama namun tidak semua mendapatkan bantuan dari PKH. Hal ini dikarenakan data mengenai calon penerima bantuan hanya akan diupdate 5 tahun sekali, sehingga data penerima hanya akan bisa diperbaharui setelah berjalan 5 tahun, tidak bisa diganti ataupun ditambahkan. Para pelaksana khususnya Unit Pelaksana Kota Denpasar hanya bisa mengurangi jumlah penerima PKH saja.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator **Keberhasilan Program** sudah berjalan dengan baik dan memenuhi keoptimalan dalam proses pelaksanaannya yang mengacu pada aspek proses yang menggambarkan bagaimana Program Keluarga Harapan bisa dapat berkembang dan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program yakni mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Pada aspek mekanisme dapat dilihat bahwa tahapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah menggambarkan secara baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Keluarga Penerima Manfaat juga mengikuti dengan baik semua alur dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pusat.

Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran adalah satu indikator dari efektivitas program. Keberhasilan sasaran dapat dipahami sebagai pemusatan perhatian terhadap masukan (input) dan keluaran (output) dimana efektivitas diukur seberapa jauh tingkat output program dan prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah rumah tangga/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM), namun tidak semua RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) bisa menjadi peserta PKH. Bantuan PKH ini diberikan hanya kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta memiliki komponen kesehatan (balita dan ibu hamil), pendidikan (anak SD, SMP, dan SMA), dan kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas sosial).

Kategori yang digunakan sebagai bentuk kesesuaian sasaran dari Program Keluarga Harapan yaitu dengan melihat apakah program ini dalam hal mekanisme dan proses pendataan KPM sudah benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kota Denpasar, ditemukan bahwa langkah yang diambil pemerintah guna mencapai keberhasilan sasaran dari Program Keluarga Harapan ini tidak mudah. pemerintah desa harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat, untuk menetapkan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan PKH ini. Verifikasi data bertujuan untuk menghindari adanya masyarakat yang kehidupannya sudah layak namun mendapatkan manfaat PKH.

Menurut Bapak Asa Ismansyah selaku Koordinator PKH Kota Denpasar, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Denpasar Utara khususnya Desa Pemecutan Kaja dalam aspek keberhasilan sasaran sudah mencapai 80% sedangkan untuk 20 % lagi masuk ke dalam kategori KPM Graduasi atau KPM yang seharusnya masuk graduasi namun enggan melaporkan diri atau biasa disebut Graduasi Mandiri. Terlepas dari adanya KPM yang enggan melaporkan diri, dapat kita lihat bahwa dengan keberhasilan sasaran yang mencapai 80% hal ini menandakan keluarga penerima manfaat sangat terbantu dengan adanya program ini. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Desa Pemecutan Kaja, yang dimana mengatakan bahwa program PKH ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat kecil seperti mereka khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun jika dilihat kembali masih terdapat beberapa kendala dalam menentukan

keberhasilan sasaran seperti pola pikir masyarakat yang menganggap bantuan itu sebagai penghasilan utama serta kurangnya kesadaran dari KPM yang sudah seharusnya tidak menerima bantuan lagi tetapi tidak melaporkan diri.

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis indikator **keberhasilan sasaran** pada Program Keluarga Harapan berjalan dengan baik dimana penetapan sasaran telah dilakukan sesuai dengan tupoksi implementor, dan semua calon penerima yang ada itu sudah keputusan dari Kementerian Sosial, walaupun pendamping tau sebenarnya ada KPM yang enggan melaporkan diri tetapi pendamping tidak bisa semena-mena mengeluarkan penerima manfaat PKH itu dari penerima manfaat, karena pengeluaran penerimaan manfaat itu harus adanya surat pernyataan dari Desa yang diajukan ke kementerian, dan kemudian kementerian yang berhak mengeluarkan penerima manfaat itu sendiri.

Kepuasan terhadap Program

Indikator kepuasan terhadap program merupakan tanggapan dan pendapat yang dirasakan penerima program dan pelaksana program. Indikator kepuasan program dari sisi penerima program sebagai bentuk kelayakan program untuk dijalankan, dalam sisi pelaksana program yakni sebagai bentuk pengevaluasian program untuk dilihat apa saja yang perlu dibenahi atau perlu di pertahankan.

Pada Program Keluarga Harapan di Desa Pemecutan Kaja, kepuasan masyarakat dapat ditinjau dari bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Program ini, dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai obyeknya merasakan manfaat dari adanya program ini. Berdasarkan pernyataan dari narasumber Keluarga Penerima Manfaat PKH ini merasa sangat puas dengan bantuan maupun pelayanan yang mereka dapat dari program Keluarga Harapan (PKH). Program ini membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menambah modal usaha. keluarga penerima manfaat juga mendapatkan kemudahan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pada bidang pendidikan dimana anak-anak yang menginginkan untuk melanjutkan sekolah ke sekolah negeri akan diutamakan serta mendapatkan bantuan komponen, dimana bantuan ini dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pendidikan mereka. Pada bidang kesehatan, keluarga penerima manfaat akan selalu diberikan pengarahan untuk menjaga kesehatan anak serta adanya pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan salah satu dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Aspek lainnya yang digunakan untuk mengukur kepuasan terhadap program dari Dinas Sosial Kota Denpasar yakni dilihat dari kualitas pelayanan tiap tahapnya yang semakin baik tentunya semua program juga diterima dengan baik oleh KPM. Adanya perubahan yang dirasakan oleh pendamping dari KPM dimana mereka mulai tidak menganggap bantuan itu sebagai mata pencaharian, mereka mengikuti semua pelatihan yang diadakan, mereka siap hadir di pertemuan dengan para pendamping, rajin mengikuti seminar dan workshop yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar, dimana yang biasanya tidak hadir namun sekarang rajin hadir. Pendamping PKH juga menilai bahwa adanya rasa syukur karena para keluarga penerima manfaat menyampaikan kepuasan mereka akan Program Keluarga Harapan.

Disamping tanggapan yang positif dari KPM, masih terdapat masyarakat yang kurang puas dengan intensitas pencairan dana PKH yang dirasa belum bisa memberikan manfaat sepenuhnya seperti yang dikatakan salah satu KPM PKH di Desa Pemecutan Kaja, mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi tiap anggota keluarga.

Berdasarkan analisis temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa **Kepuasan terhadap Program** dari Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya dalam kategori puas, yang dimana terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan keluarga penerima manfaat dari adanya program ini. Meski demikian bahwa sejatinya Program Keluarga Harapan ini sudah diterima baik oleh keluarga penerima manfaat dalam hal meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

Tingkat Output dan Input

Indikator Tingkat Output dan Input merupakan suatu perbandingan antara masukan (input) maupun keluaran (output), Jika output (keluaran) suatu kegiatan lebih besar dibandingkan dengan input (masukan) dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika lebih besar input (masukan) dari pada output (keluaran) maka kegiatan tersebut dikatakan tidak efisien. Program Keluarga Harapan dalam outputnya menghasilkan 4 keluaran (output) seperti (1) Kemampuan pelaksana Program Keluarga Harapan yakni Dinas Sosial Kota Denpasar beserta Pemerintah Desa Pemecutan Kaja yang sudah mampu memberdayakan keluarga penerima manfaat untuk bisa sesuai dengan tujuan

Program Keluarga Harapan. Adanya P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) yang dimana kegiatan ini sangat penting bagi KPM guna menentukan keberhasilan dari pelaksanaan program ini, karena dengan adanya P2K2 yang menitik beratkan kepada proses transfer ilmu yang dimiliki oleh pendamping kepada KPM guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari KPM itu sendiri. Dengan ilmu ini, nantinya KPM akan bisa keluar dari zona bawah yang akan berimbas pada peningkatan pendidikan anak, kesehatan bagi ibu hamil dan nifas, serta kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. (2) Program Keluarga Harapan ini berhasil memotivasi keluarga penerima manfaat untuk terus melakukan peningkatan ekonomi dari yang hanya dirumah saja, kini sudah bisa mulai berwirausaha. Kemudian dari yang hanya berjualan kecil-kecilan dirumah, kini sudah memiliki tempat yang layak bahkan sudah bisa membuka lapangan pekerjaan, (3) Adanya payung hukum yang dimiliki Program Keluarga Harapan dimana hal ini didukung oleh Pemerintah Kota Denpasar dari segi pemberian regulasi akan program Program Keluarga Harapan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Daerah Tangguh Sosial, (4) Bantuan kerjasama dari berbagai pihak dalam membantu penyokong fasilitas selama pelaksanaan Program Keluarga Harapan guna mencapai tujuan dari program ini.

Masukan dari adanya Program Keluarga Harapan yakni dari pihak keluarga penerima manfaat yang berkeinginan untuk terus diberikannya sosialisasi serta pelatihan secara mendalam untuk setiap kelompok, disamping demikian Prebikel Desa Pemecutan Kaja juga memberikan masukan akan adanya Program Keluarga Harapan yakni agar program ini juga untuk memupuk rasa kekeluargaan antar pendamping dengan keluarga penerima manfaat maupun keluarga penerima manfaat dengan keluarga penerima manfaat lainnya. Secara keseluruhan Program Keluarga Harapan ini secara output telah berjalan 80% dengan baik dan kategori input sebanyak 20% yang mana kita pergunakan sebagai perenungan dan perbaikan agar kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi.

Berdasarkan analisis hasil temuan terkait Indikator **Tingkat Output dan Input** Program Keluarga Harapan dapat dinyatakan efektif dan efisien dimana banyaknya Output (keluaran) dari pada Input (masukan) yang ada Program Keluarga Harapan. Banyaknya output dapat menggambarkan bahwa Program Keluarga Harapan sudah berkembang dengan baik dan pada proses pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan ketentuan.

Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Indikator Pencapaian Tujuan diartikan sebagai bentuk memantau sejauh mana pelaksana program sudah melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini penilaian umum suatu program dapat dikatakan bahwa terkait dengan kesesuaian program apakah program yang dijalankan sesuai dengan visi dan misi program dan juga apakah tujuan program sudah terlaksana, serta hubungan dalam setiap aspek Program Keluarga Harapan sudah terjalin dengan baik. Program Keluarga Harapan sudah mencapai tujuan program sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Berdasarkan hasil temuan penulis adapun dilihat dari tujuan PKH yang **pertama** KPM telah menjadi lebih sadar terhadap pendidikan dan kesehatan mereka, dikarenakan akan ada sanksi yang diterima apabila keluarga malas untuk memeriksakan kesehatan diri dan malas untuk bersekolah. Adanya sanksi yang akan diterima akan memberikan rasa takut tersendiri bagi KPM, sehingga KPM menjadi lebih peduli terhadap kesehatan dan pendidikan keluarga mereka.

Tujuan **kedua** adalah untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan bahwa memang ada uang tambahan yang diterima oleh KPM yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat mengurangi beban keluarga mereka. Tujuan **ketiga** yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, seperti yang dijelaskan dalam tujuan pertama bahwa ada sanksi yang akan diterima KPM apabila tidak memenuhi kewajiban mereka, maka ini akan berdampak pada perubahan perilaku mereka yang semula menjadi kurang peduli menjadi lebih peduli. Hal ini juga didukung dengan hasil validasi yang dilakukan oleh pendamping yang membuktikan bahwa memang rata-rata semua KPM hadir apabila ada imunisasi untuk anak, pemeriksaan kesehatan rutin dan jarang nya absen disekolah.

Tujuan **keempat** dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarkelompok pendapatan, dalam melihat realisasi dari poin keempat ini dapat dilihat dari pengurangan jumlah KPM di Desa Pemecutan Kaja yang semula jumlah KPMnya adalah 190 KK kini menjadi 155 KK. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa PKH ini telah dapat mengurangi kemiskinan di Desa Pemecutan Kaja. Tujuan **kelima** atau terakhir adalah untuk mengenalkan

manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM, maksudnya adalah agar KPM dapat memanfaatkan uang yang diperoleh dari bantuan PKH untuk investasi masa depan atau untuk ditabung. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan maka poin kelima ini telah dapat terealisasi juga meskipun tidak semuanya. KPM akan mendapatkan uang tambahan dari dana bantuan PKH, terlebih ada bantuan komponen yang didapat sehingga uang yang tersisa dapat ditabung kembali, sehingga tujuan untuk mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM telah terealisasi juga.

Berdasarkan hasil analisis temuan terkait indikator **Pencapaian Tujuan Menyeluruh** pada Program Keluarga Harapan sudah mencapai 85% dan untuk 15% nya merupakan pengaruh dari mindset KPM yang masih menganggap bantuan PKH ini sebagai mata pencaharian. Terlihat bahwa pelaksanaan PKH ini sudah sesuai dengan tujuan dan adanya kolaborasi yang baik antara Dinas Sosial Kota Denpasar dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan analisis hasil temuan tersebut terkait Efektifitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang dikaji melalui teori efektifitas oleh Campbell J.P yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat output dan input serta pencapaian tujuan menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pemecutan Kaja sudah efektif dan efisien namun belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga masih perlu adanya perbaikan dan kedepannya serta dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pemecutan Kaja mengingat memang masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, namun untuk keberlanjutan Program Keluarga Harapan di Desa Pemecutan Kaja masih tetap layak dilanjutkan pelaksanaannya terutama pelaksanaan P2K2 yang sangat bermanfaat bagi KPM guna meningkatkan kualitas diri mereka dalam hal pendidikan, ekonomi dan sosial.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya efektif walaupun telah terselenggara dengan cukup optimal. Hal tersebut terjadi karena terdapat indikator dalam Efektivitas Program berdasarkan teori efektifitas program oleh Campbell J.P yang belum terpenuhi secara baik yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator Keberhasilan Program, dapat dikatakan optimal karena Program Keluarga Harapan sudah mampu menjalankan program dengan baik dan sejauh ini Program Keluarga Harapan dalam proses pelaksanaannya sudah berkembang dan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program yakni mengurangi beban pengeluaran serta menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Pada aspek mekanisme dapat dilihat bahwa tahapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah tergambar secara baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
2. Indikator Keberhasilan Sasaran, Program Keluarga Harapan berjalan dengan baik dimana penetapan sasaran telah dilakukan sesuai dengan tupoksi implementor, dan semua calon penerima yang ada itu sudah keputusan dari Kementerian Sosial, walaupun pendamping tau sebenarnya ada KPM yang enggan melaporkan diri tetapi pendamping tidak bisa semena-mena mengeluarkan penerima manfaat PKH itu dari penerima manfaat, karena kementerian yang berhak mengeluarkan penerima manfaat itu sendiri.
3. Kepuasan terhadap Program, Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya dalam kategori puas, yang dimana masih terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan keluarga penerima manfaat dari adanya program ini. Meski demikian bahwa sejatinya Program Keluarga Harapan ini sudah diterima baik oleh keluarga penerima manfaat dalam hal meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.
4. Tingkat Output dan Input, Program Keluarga Harapan dapat dinyatakan efektif dan efisien dimana banyaknya Output (keluaran) dari pada Input (masukan) yang ada Program Keluarga Harapan. Banyaknya output dapat menggambarkan bahwa Program Keluarga Harapan sudah berkembang dengan baik dan pada proses pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan ketentuan.
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh dapat dikatakan baik dilihat dari sudah sesuai pelaksanaan Program

Keluarga Harapan (PKH) ini dengan tujuan yang telah ditetapkan serta adanya kolaborasi yang baik antara Dinas Sosial Kota Denpasar dengan Pemerintah Daerah dalam implementasinya di lapangan.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, S. E. (2020). Kemiskinan dan Faktor-faktor Penyebabnya. *Journal of Social Work and Social Service*, 43.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta Bandung.
- Campbell, J. P. (1989). *Teori Efektivitas, dalam Richard M: Efektivitas Organisasi 2005*. Bandung: Erlangga.
- Darmayanthi, N. P., Yasintha, P. N., & SUPRILIYANI, N. W. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup RTSM di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Citizen Charter*.
- Dr. Rudy Gunawan, M. (2022). Kemiskinan Perempuan dan Rentan di Perkotaan Serta Penanggulangannya.
- Kementerian Sosial RI. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian Sosial 2021*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Lestari, R. W., & Talkah. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat PKH di Kecamatan Panggunrejo Kabupaten Blitar. *REVITALISASI : Jurnal Ilmu Manajemen*, 229-241.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Daerah Tangguh Sosial
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2
- Undang-undang No.11 Tahun 2009 bagian II pasal 25
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.